



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026

Das Glück liegt im Inneren. Es hat nichts damit zu tun, wie viel Applaus Sie bekommen oder wie viele Menschen Ihnen schmeicheln. Glück kommt, wenn man glaubt, etwas wirklich Wertvolles getan zu haben – Martin Yan. Kebahagiaan berada di dalam. Hal itu tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak tepuk tangan yang kau peroleh atau seberapa banyak orang yang menyanjungmu. Kebahagiaan datang saat kau percaya telah melaksanakan sesuatu yang benar-benar berharga – Martin Yan

2026



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah yang berkeadilan dan demokratis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan penjawantahan dari tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas, dan kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah, perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah yang berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10);
 10. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang meliputi:
 - a. bab I mengenai pendahuluan;
 - b. bab II mengenai hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025;
 - c. bab III mengenai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV mengenai rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - e. bab V mengenai penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana kerja dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. rencana kerja dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. rencana kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. rencana kerja dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. rencana kerja dinas kebakaran dan penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. rencana kerja satuan polisi pamong praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. rencana kerja badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. rencana kerja dinas sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. rencana kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. rencana kerja dinas lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
 - k. rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. rencana kerja dinas perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;

- m. rencana kerja dinas komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 - n. rencana kerja dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - o. rencana kerja dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
 - p. rencana kerja dinas pemuda dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
 - q. rencana kerja dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
 - r. rencana kerja dinas pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
 - s. rencana kerja dinas pertanian dan ketahanan pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
 - t. rencana kerja dinas perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
 - u. rencana kerja sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
 - v. rencana kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
 - w. rencana kerja badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
 - x. rencana kerja badan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
 - y. rencana kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
 - z. rencana kerja inspektorat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
 - aa. rencana kerja kecamatan mandiingin koto salayan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
 - bb. rencana kerja kecamatan guguk Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
 - cc. rencana kerja kecamatan aur birugo tigo baleh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX; dan
 - dd. rencana kerja badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX,
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS



Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI



BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2026 ini dapat disusun sebagai bagian dari upaya perencanaan strategis satu tahunan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025–2029.

Rencana kerja ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan kompas arah dan komitmen moral Badan Keuangan dalam menjawab dinamika tantangan pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks dan dinamis. Di tengah tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan, Badan Keuangan hadir sebagai pilar utama yang memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara bijak, adil, dan berpihak pada kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi reformasi birokrasi dan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja ini diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kinerja keuangan, penataan aset yang profesional, serta penguatan kapasitas aparatur dan sistem pengendalian internal yang terintegrasi.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari internal Badan Keuangan maupun perangkat daerah lainnya, serta seluruh pemangku kepentingan yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman yang kokoh dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Keuangan tahun 2026, serta menjadi bagian dari ikhtiar kolektif kita untuk mewujudkan "Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya."

Bukittinggi, September 2025
Plt. Kepala Badan Keuangan



ELOHANSEN PANJAITAN
NIP 197308172000031008

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4 Sistematika penulisan.....	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN TAHUN 2024	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Badan Keuangan	4
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan	15
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan	15
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
	3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan.....	36
	3.3 Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN.....	53
BAB V	PENUTUP.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2024	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan.....	15
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Bukittinggi.....	19
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan	37
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Badan Keuangan memiliki peran strategis sebagai motor penggerak utama dalam pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pengelolaan aset, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perencanaan kerja yang terarah, terukur, dan responsif terhadap dinamika pembangunan menjadi pondasi penting dalam mendukung keberhasilan program-program prioritas daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Tahun 2026 dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan tahunan, yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Renja ini juga disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional, dinamika fiskal, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan, seperti keterbatasan fiskal, tuntutan peningkatan kualitas belanja, digitalisasi layanan, serta kebutuhan reformasi birokrasi, menjadi faktor penting yang harus diantisipasi dalam perencanaan kerja tahun 2026. Renja ini disusun untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang benar-benar memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Laporan Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja yang operasional, terintegrasi, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan secara optimal, demi terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efisien, dan akuntabel.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah maka tata cara dalam penyusunan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tata cara dan alur penyusunan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan antara lain :

1. Rencana Kerja disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2026 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Bahwa Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan, mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029;
8. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah pada tahun

anggaran 2026. Dokumen ini juga berfungsi sebagai penjabaran rencana strategis (Renstra) Badan Keuangan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Keuangan Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan sasaran strategis kepala daerah ke dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan.
2. Menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, hingga RKPD dan KUA-PPAS.
3. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, melalui perencanaan kegiatan yang terukur dan berbasis kinerja.
4. Mengidentifikasi kebutuhan riil dan prioritas kegiatan dalam bidang keuangan daerah, termasuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan belanja, aset, dan akuntansi keuangan.
5. Meningkatkan koordinasi internal dan sinergi lintas perangkat daerah, dalam rangka menyukseskan target pembangunan daerah melalui pengelolaan fiskal yang optimal.
6. Merespons tantangan aktual dan dinamika kebijakan fiskal, baik di tingkat nasional maupun daerah, agar pelaksanaan program keuangan dapat adaptif, responsif, dan sesuai regulasi terbaru.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Rencana Kerja terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan;

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2024

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan tahun 2024, memuat Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Badan keuangan

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan serta Program dan Kegiatan tahun 2026;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan.

Bab V : Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Badan Keuangan

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2024 merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan periode 2021–2026. Evaluasi terhadap kinerja tahun 2024 menjadi dasar penting dalam merumuskan rencana kerja tahun 2026, guna menjaga kesinambungan program dan pencapaian sasaran strategis.

Secara umum, capaian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan pada tahun 2024 menunjukkan tren yang positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian dalam penyusunan rencana tahun berikutnya. Beberapa indikator kinerja utama yang berhasil dicapai antara lain:

- Tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yang mencerminkan efektivitas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
- Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang diukur melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap berada pada level *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*, yang mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
- Tingkat serapan anggaran dan efisiensi belanja daerah menunjukkan perbaikan, ditandai dengan perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang lebih tertib.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah terus ditingkatkan, mendukung terwujudnya sistem informasi keuangan yang lebih terintegrasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas
- Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah
- Masih terdapat potensi PAD yang belum tergarap maksimal.

Dalam konteks capaian Rencana Strategis Badan Keuangan 2021–2026 hingga tahun 2024, sebagian besar sasaran strategis telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk merumuskan rencana kerja tahun 2026 agar tetap selaras dengan arah pembangunan jangka menengah dan target akhir Renstra.

Evaluasi ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki kelemahan, menyesuaikan program dengan kebutuhan aktual, serta memperkuat inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan. Dengan berbekal hasil evaluasi tersebut, Badan Keuangan Kota Bukittinggi diharapkan mampu menyusun rencana

kerja tahun 2026 secara lebih responsif, adaptif, dan strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi yaitu pada bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 pada Badan Keuangan mengacu kepada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2021-2026, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024 serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan untuk Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana KerjaBadan Keuangan dan
Pencapaian Rencana Strategis Badan Keuangan s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana StrategisBadan Keuangan) Tahun 2026 (Akhir Periode Rencana Strategis)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Rencana KerjaBadan KJeuangan tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s/d tahun berjalan	
									Target Rencana KerjaBadan Keuangan tahun 2024	Realisasi Rencana KerjaBadan Keuangan tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	0	0	0	KEUANGAN									
5	2	2	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
5	2	2	2,01	0	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perencanaan penganggaran sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	KUA dan PPAS yang dihasilkan	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	100%	2 Buku	10 Buku	100%
5	2	2	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	100%	2 Buku	10 Buku	100%
5	2	2	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	DPA SKPD diverifikasi	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	100%	28 SKPD	28 SKPD	100%
5	2	2	2,01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	DPPA SKPD diverifikasi	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	100%	28 SKPD	28 SKPD	100%
5	2	2	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Perda APBD	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	100%	1 Perda	5 Perda	100%
						2. Perwako APBD	1 Perwako	1 Perwako	1 Perwako	1 Perwako		1 Perwako	5 Perwako	
5	2	2	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Perda PAPBD	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	100%	1 Perda	5 Perda	100%
						2. Perwako PAPBD	2 Perwako	2 Perwako	2 Perwako	2 Perwako		2 Perwako	10 Perwako	
5	2	2	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang	Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Badan Keuangan) Tahun 2026 (Akhir Periode Rencana Strategis)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja Badan KJeuangan tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s/d tahun berjalan	
									Target Rencana Kerja Badan Keuangan tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Badan Keuangan tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Anggaran									
5	2	2	2,02	0	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan keuangan daerah sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SPP, SPM gaji dan pengesahan SPJ gaji yang diteliti	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	100%	600 Dokumen	3000 Dokumen	100%
5	2	2	2,02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Laporan penatausahaan pembiayaan daerah	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	100%	600 Dokumen	3000 Dokumen	100%
5	2	2	2,02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan dana transfer disampaikan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100%	9 Laporan	45 Laporan	100%
5	2	2	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	168 penyetoran PFK	168 penyetoran PFK	168 penyetoran PFK	168 penyetoran PFK	100%	168 penyetoran PFK	1840 penyetoran PFK	100%
5	2	2	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda	7 Transaksi	7 Transaksi	7 Transaksi	7 Transaksi	100%	7 Transaksi	7 Transaksi	100%
						2. Jumlah transaksi kas daerah deposito	5 Transaksi	5 Transaksi	5 Transaksi	5 Transaksi		5 Transaksi	5 Transaksi	
5	2	2	2,02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Berita acara rekonsiliasi data penerimaan	12 Berita Acara	12 Berita Acara	12 Berita Acara	12 Berita Acara	100%	12 Berita Acara	60 Berita Acara	100%
5	2	2	2,02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan	1 Perwako	-	-	-	-	1 Perwako	-	0%



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana StrategisBadan Keuangan) Tahun 2026 (Akhir Periode Rencana Strategis)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Rencana KerjaBadan KJeuangan tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s/d tahun berjalan	
									Target Rencana KerjaBadan Keuangan tahun 2024	Realisasi Rencana KerjaBadan Keuangan tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
5	2	2	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen SP2D SKPD selain gaji	2000 SP2D	2000 SP2D	2000 SP2D	2000 SP2D		2000 SP2D	10.000 SP2D	
5	2	2	2,03	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kualitas pelaporan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	2,03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	100%	28 SKPD	28 SKPD	100%
5	2	2	2,03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1. Jumlah Informasi Keuangan Daerah yang disusun	12 Informasi	12 Informasi	12 Informasi	12 Informasi	100%	12 Informasi	60 Informasi	100%
						2. Laporan Keuangan semester 1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	
						3. Prognosis 6 bulan berikutnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	
5	2	2	2,03	04	Konsolidasi laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Pemerintah Daerah	Laporan Konsolidasi laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	2	2	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	100%	1 Perda	5 Perda	100%
						2. Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perwako	1 Perwako	1 Perwako	1 Perwako		1 Perwako	5 Perwako	



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana StrategisBadan Keuangan) Tahun 2026 (Akhir Periode Rencana Strategis)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Rencana KerjaBadan KJeuangan tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s/d tahun berjalan	
									Target Rencana KerjaBadan Keuangan tahun 2024	Realisasi Rencana KerjaBadan Keuangan tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	02	02	2.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	30 Laporan	100%
5	2	2	2.04	0	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	2	2	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan analisis perencanaan	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	10 laporan	100%
5	2	2	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan mendesak tersedia	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	5 Tahun	100%



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Badan Keuangan) Tahun 2026 (Akhir Periode Rencana Strategis)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja Badan KJeuangan tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s/d tahun berjalan	
									Target Rencana Kerja Badan Keuangan tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Badan Keuangan tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem Terintegrasi	6 Bidang Pengelolaan	6 Bidang Pengelolaan	6 Bidang Pengelolaan	6 Bidang Pengelolaan	100%	6 Bidang Pengelolaan	6 Bidang Pengelolaan	100%
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
5	2	3	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan BMD sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	3	2,01	0	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	3	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%	1 buku	5 buku	100%
5	2	3	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1. Dokumen RKBMD	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	5 Buku	100%
						2. Dokumen RKPMBMD	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku		1 Buku	5 Buku	
5	2	3	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honoranya	145 orang	145 orang	145 orang	145 orang	100%	145 orang	145 orang	100%
5	2	3	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan	10 sertifikat	-	10 sertifikat	-	100%	10 sertifikat	10 sertifikat	100%
5	2	3	2,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah penilaian barang milik daerah	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5	2	3	2,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. BMD yang dipindatangankan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	10 Jenis	100%
						2. BMD yang diawasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	
						3. BMD yang dapat dikendalikan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	
5	2	3	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah	29 penetapan status	29 penetapan status	29 penetapan status	29 penetapan status	100%	29 penetapan status	29 penetapan status	100%
						2. Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai		50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	
						3. Jumlah objek	29 status pengalihan	29 status pengalihan	29 status pengalihan	29 status pengalihan		29 status pengalihan	29 status pengalihan	



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana StrategisBadan Keuangan) Tahun 2026 (Akhir Periode Rencana Strategis)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Rencana KerjaBadan KJeuangan tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s/d tahun berjalan	
									Target Rencana KerjaBadan Keuangan tahun 2024	Realisasi Rencana KerjaBadan Keuangan tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						pemanfaatann aset								
						4. Jumlah HGB diatas HPL yang tertata	76 HGB diatas HPL	76 HGB diatas HPL	76 HGB diatas HPL	76 HGB diatas HPL		76 HGB diatas HPL	76 HGB diatas HPL	
5	2	3	2,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah yang melakukan pembinaan	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	0	0	
5	2	4	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	4	2,01	0	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Realisasi PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	4	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5	2	4	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah yang diberi Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2000 WP	2000 WP	2000 WP	2000 WP	100%	2000 WP	2000 WP	2000 WP
5	2	4	2,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	1 Paket
5	2	4	2,01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Objek Pajak Baru	10 Objek	10 Objek	10 Objek	10 Objek	100%	10 Objek	50 Objek	100%
5	2	4	2,01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Data Pajak Online Terintegrasi	10 Data Online	10 Data Online	10 Data Online	10 Data Online	100%	10 Data Online	10 Data Online	100%
5	2	4	2,01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Termutakhirkan Data PBB P2	7500 Objek PBB P2	7500 Objek PBB P2	7500 Objek PBB P2	-	100%	7500 Objek PBB P2	7500 Objek PBB P2	100%
5	2	4	2,01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen Pajak yang Ditetapkan	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPKDBT/SKPDN	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPKDBT/SKPDN	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPKDBT/SKPDN	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPKDBT/SKPDN	100%	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPKDBT/SKPDN	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPKDBT/SKPDN	100%
5	2	4	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Penagihan Pajak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana StrategisBadan Keuangan) Tahun 2026 (Akhir Periode Rencana Strategis)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Rencana KerjaBadan KJeuangan tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s/d tahun berjalan	
									Target Rencana KerjaBadan Keuangan tahun 2024	Realisasi Rencana KerjaBadan Keuangan tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	4	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Berita Acara Pemeriksaan	10 Berita Acara	10 Berita Acara	10 Berita Acara	10 Berita Acara	100%	10 Berita Acara	50 Berita Acara	100%
5	2	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A	BB	A	BB	75%	A	A	100%
5	2	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program dan kegiatan yang selaras	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang dihasilkan	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	100%
5	2	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan	78 orang		78 orang	78 orang	100%	78 orang	78 orang	
5	2	1	2,03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengamanan kantor terbayarkan	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100%	5 orang	25 orang	100%
5	2	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
5	2	1	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Piring, gelas, sendok tersedia	3 Jenis	0	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
5	2	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	46 jenis;	46 jenis;	46 jenis;	46 jenis;	100%	46 jenis;	46 jenis;	100%
5	2	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
						2. Barang cetakan keperluan kantor tercetak	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan		12 Bulan	60 Bulan	
						3. Fotocopy dan penjiilidan terbayarkan	70.000 Lembar	70.000 Lembar	70.000 Lembar	... Lembar		70.000 Lembar	350.000 Lembar	
5	2	1	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan	1. Snack tamu	500 Porsi	500 Porsi	500 Porsi	500 Porsi	100%	500 Porsi	3.000 Porsi	100%



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Badan Keuangan) Tahun 2026 (Akhir Periode Rencana Strategis)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja Badan KJeuangan tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s/d tahun berjalan	
									Target Rencana Kerja Badan Keuangan tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Badan Keuangan tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Tamu	2. Makanan ringan pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	60 Bulan	
						3. Makan dan minum	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari		60 Hari	300 Hari	
5	2	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Perjalanan dinas terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
						2. Makanan dan minuman rapat dan lembur tersedia	12 Bualn	12 Bualn	12 Bualn	12 Bualn		12 Bualn	60 Bualn	
5	2	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai tersedia	150 lembar	150 lembar	150 lembar	150 lembar	100%	150 lembar	750 lembar	100%
						2. Paket pengiriman tersedia	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	5 Tahun	
5	2	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, telp, air, fax/internet, TV kabel terbayarkan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
5	2	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang disediakan pemeliharaannya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
5	2	1	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional yang disediakan pemeliharaannya	39 unit	39 unit	39 unit	39 unit	100%	39 unit	39 unit	100%
5	2	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Genset dan mesin perforasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
5	2	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia	14 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	14 jenis	14 jenis	100%
						2. Jasa cleaning service tersedia	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang		4 orang	20 orang	
						3. Retribusi sampah terbayarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	60 bulan	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana StrategisBadan Keuangan) Tahun 2026 (Akhir Periode Rencana Strategis)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Rencana KerjaBadan KJeuangan tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s/d tahun berjalan	
					Target Rencana KerjaBadan Keuangan tahun 2024	Realisasi Rencana KerjaBadan Keuangan tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung		1 gedung	1 gedung	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Badan Keuangan secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja Badan Keuangan, Indikator Kinerja badan didapatkan dari Indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Pencapaian Indikator Kinerja Badan Keuangan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan
Kota Bukittinggi Tahun 2024-2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

No.	Indikator	SPM/S tandar Pelaya nan Nasion al	IKK	Target Rencana StrategisBadan Keuangan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sa
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	-	✓	20,29	20,53	-	-	21,28	-	-	-	
2.	Opini WTP atas LKPD	-	✓	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Capaian realisasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan, tahun 2024 target sebesar 20,29 persen realisasi sebesar 21,28 persen. Indikator “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/PAD terhadap Pendapatan (%)” tidak diisi pada kolom target, realisasi, dan proyeksi untuk tahun 2026 dan 2027, karena berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2025–2029, indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan capaian kinerja atas indikator ini dihentikan sejak berakhirnya periode Renstra sebelumnya (2020–2024).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan

Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2025–2029, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi **"Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya"** merupakan cerminan dari komitmen kuat Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menghadirkan perubahan yang berorientasi pada kemajuan, keadilan sosial, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. **"Gemilang"** sebuah tatanan kehidupan yang maju, modern, inklusif dan berkelanjutan, dengan mengembangkan konsep perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan sumber daya dikembangkan secara

efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota melalui pendekatan planologis (tata ruang) dan ekologis (lingkungan hidup)..

"Berkeadilan" pembangunan kota diarahkan kepada pencapaian peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran melalui pengembangan ekonomi inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Perolehan manfaat pembangunan terdistribusi dengan lebih merata diantara sesama warga kota. Kota Berkeadilan merupakan kota yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya, baik secara ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. Setiap warga memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, dan peluang ekonomi, tanpa diskriminasi. Pengembangan ekonomi dilakukan dengan mengedepankan prinsip inklusivitas, di mana semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, terlibat dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

"Berbudaya" prikehidupan warga kota yang memegang teguh nilai-nilai luhur warisan budaya sehingga membentuk kepribadian yang kuat dengan identitas seutuhnya masyarakat Bukittinggi yang berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Bukittinggi berbudaya dimaksudkan pula sebagai suatu kondisi dimana kota ini berfungsi sebagai pusat kebudayaan yang dinamis yang mewadahi berlangsungnya berbagai event-event kebudayaan.

Badan Keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang serasi dan selaras dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam bidang pengelolaan keuangan baik secara makro maupun secara mikro.

Misi :

Berdasarkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2025–2029, Badan Keuangan Kota Bukittinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Misi Kelima, yaitu ***"Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik."*** Sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan berkomitmen untuk membangun sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, efisien, dan berbasis pada prinsip-prinsip good governance. Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan manajemen keuangan daerah, optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan keuangan yang lebih efektif. Upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab institusional Badan Keuangan untuk memastikan bahwa visi ***"Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya"*** dapat terwujud melalui fondasi pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani. Dengan demikian, Badan Keuangan tidak hanya menjadi motor penggerak dalam aspek fiskal, tetapi juga menjadi pilar penting dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Dalam mendukung pelaksanaan misi pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Keuangan Kota Bukittinggi dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang harus dikelola secara cermat dan adaptif. Isu-isu ini muncul seiring dengan dinamika pembangunan daerah, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, identifikasi isu-isu penting berikut menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan selama periode 2025–2029:

Isu-Isu Penting:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih menjadi tantangan utama, sehingga diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk digitalisasi sistem pemungutan retribusi dan pajak daerah.

2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Masih terdapat gap antara perencanaan dan penganggaran yang berdampak pada kurang optimalnya realisasi program prioritas daerah. Perlu penguatan sinergi antar perangkat daerah dan pemanfaatan teknologi dalam sistem penganggaran.

3. Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Tuntutan terhadap akuntabilitas publik semakin tinggi. Diperlukan penguatan sistem pelaporan keuangan, pengawasan internal, serta pemenuhan standar laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi nasional.

4. Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah

Banyaknya aset daerah yang belum tertib administrasi dan belum dimanfaatkan secara optimal menghambat efisiensi keuangan daerah. Penataan dan digitalisasi data aset menjadi prioritas penting.

5. Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek kompetensi teknis, etika profesi, maupun pemanfaatan teknologi informasi.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Keuangan Daerah

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan memerlukan sistem yang terintegrasi, andal, dan aman. Perlu akselerasi penggunaan aplikasi berbasis elektronik untuk mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan.

7. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Keuangan Pemerintah

Dinamika perubahan regulasi di tingkat pusat menuntut adaptasi cepat dan tepat agar pengelolaan keuangan daerah tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Internal

Pencegahan terhadap potensi penyimpangan anggaran menuntut sistem pengendalian internal yang efektif dan terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pengembangan dan implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RKPD bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja yang komprehensif dan berorientasi pada tujuan pembangunan daerah, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2026, banyak daerah telah melakukan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melibatkan berbagai stakeholders dan melakukan konsultasi publik untuk memastikan bahwa rencana tersebut relevan dan efektif.

Pada bagian ini kami sajikan tabel review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 pada Badan Keuangan, sebagai berikut:



Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Bukittinggi

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN KEUANGAN				30.870.791.522,00	BADAN KEUANGAN				24.903.385.259,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				30.870.791.522,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				24.903.385.259,00	
5.02	KEUANGAN	Bukittinggi			30.870.791.522,00	KEUANGAN	Bukittinggi			24.903.385.259,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bukittinggi			13.864.501.686,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bukittinggi	Kualitas pelayanan internal	100 %	14.255.509.133,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bukittinggi	-	-	27.200.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bukittinggi	Program dan kegiatan yang selaras	100 %	27.198.900,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	27.200.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	27.198.900,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bukittinggi	-	-	11.811.221.787,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bukittinggi	Kualitas pelayanan internal	100 %	11.811.221.788,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bukittinggi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	11.811.221.787,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bukittinggi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	11.811.221.788,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bukittinggi	-	-	225.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bukittinggi	Kualitas pelayanan internal	-	225.000.000,00	
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	225.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	225.000.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bukittinggi	-	-	737.819.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bukittinggi	Kualitas pelayanan internal	100 %	782.427.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.495.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.443.000,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bukittinggi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	499.364.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bukittinggi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	544.086.700,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	24.251.700,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	24.188.500,00	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bukittinggi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	39.708.300,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bukittinggi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	39.708.800,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bukittinggi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	171.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bukittinggi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	171.000.000,00	
5.02.01.2.07	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bukittinggi	Kualitas pelayanan internal	-	365.654.945,00	
5.02.01.2.07.0001	-	-	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bukittinggi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	
5.02.01.2.07.0006	-	-	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bukittinggi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	365.654.945,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bukittinggi	-	-	173.420.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bukittinggi	Kualitas pelayanan internal	100 %	173.420.000,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.420.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.420.000,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bukittinggi	-	-	889.840.399,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bukittinggi	Kualitas pelayanan internal	100 %	870.586.500,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bukittinggi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.190.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bukittinggi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.190.000,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bukittinggi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	524.138.199,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bukittinggi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	439.000.000,00	
5.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Bukittinggi	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	17.760.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Bukittinggi	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	17.760.000,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bukittinggi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	15.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bukittinggi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	15.000.000,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bukittinggi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	293.752.200,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bukittinggi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	359.636.500,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bukittinggi			13.236.230.076,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bukittinggi	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD; Persentase alokasi infrastruktur pelayanan publik; Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar; Persentase penurunan SILPA; Persentase laporan keuangan tepat waktu		6.968.973.576,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bukittinggi	-	-	1.382.009.176,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bukittinggi	Persentase dokumen alokasi belanja pegawai non-guru yang diverifikasi dan sesuai ketentuan TKD; Persentase kegiatan prioritas layanan publik yang didukung oleh alokasi anggaran infrastruktur	100 % 100 % undefined undefined	1.232.008.976,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bukittinggi	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	215.770.176,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bukittinggi	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	195.770.176,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	206.425.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	186.425.200,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bukittinggi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	33.589.100,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bukittinggi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	33.589.100,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bukittinggi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	87.474.900,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bukittinggi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	87.474.900,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bukittinggi	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	376.752.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bukittinggi	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	336.752.700,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bukittinggi	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	339.513.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bukittinggi	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	299.513.900,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	122.483.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	92.483.000,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bukittinggi	-	-	332.094.300,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bukittinggi	Persentase dokumen DPA urusan wajib pelayanan dasar yang difasilitasi tepat waktu; Persentase kegiatan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaporkan realisasi keuangannya tepat waktu	undefined undefined 100 % 100 % 100 % 100 %	362.093.400,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	30 Dokumen	38.719.500,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	30 Dokumen	38.719.500,00	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	17.790.400,00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	17.790.300,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	87.268.800,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	87.268.800,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bukittinggi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	38.096.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bukittinggi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	38.096.100,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	30.230.900,00	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	0,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	28.879.200,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	56.461.800,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bukittinggi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang	91.109.200,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bukittinggi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang	123.756.900,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bukittinggi	-	-	706.186.600,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bukittinggi	Jumlah laporan keuangan SKPD/unit kerja yang dikompilasi dan disampaikan sesuai jadwal; Persentase laporan keuangan triwulanan/bulanan yang diverifikasi dan disampaikan tepat waktu	100 % 100 % 100 % undefined undefined	797.165.200,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	30 Dokumen	48.880.400,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	30 Dokumen	48.880.400,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bukittinggi	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	53.859.400,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bukittinggi	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	53.858.700,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	23.000.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	22.200.000,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bukittinggi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	474.012.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bukittinggi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	474.011.900,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	25.007.300,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	25.007.200,00	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Bukittinggi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	55.277.500,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Bukittinggi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	98.107.000,00	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Bukittinggi	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	9 Lembaga	26.150.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Bukittinggi	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	9 Lembaga	75.100.000,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bukittinggi	-	-	10.750.620.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bukittinggi	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	100 %	4.500.000.000,00	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	9.750.620.000,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	3.500.000.000,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.000.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.000.000.000,00	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bukittinggi	-	-	65.320.000,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bukittinggi	Sistem terintegrasi	6 Bidang	77.706.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	65.320.000,00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	77.706.000,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bukittinggi			1.788.488.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bukittinggi	Persentase penambahan nilai aset tetap		1.706.997.000,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bukittinggi	-	-	1.788.488.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Persentase aset tetap hasil pengadaan yang dicatat dan diinput ke sistem sesuai jadwal; Persentase hasil inventarisasi aset baru yang ditindaklanjuti dengan pencatatan di KIB (Kartu Inventaris Barang)	0.05 % 12 Informasi 0 Temuan	1.706.997.000,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Bukittinggi	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	66.093.400,00	Penyusunan Standar Harga	Bukittinggi	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	60.093.200,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	9.065.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	9.065.000,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	1.119.260.800,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	1.119.260.700,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Laporan	200.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Laporan	124.509.600,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12 Laporan	143.554.300,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12 Laporan	143.554.300,00	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	15.841.600,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	15.841.600,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	145.897.900,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	145.897.600,00	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bukittinggi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang	88.775.000,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bukittinggi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang	88.775.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bukittinggi			1.981.571.760,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bukittinggi	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah; Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan; Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		1.971.905.550,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bukittinggi	-	-	1.981.571.760,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bukittinggi	Jumlah dokumen perhitungan potensi PAD yang disusun dan disampaikan tepat waktu; Persentase temuan pengawasan internal yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi; Persentase hasil penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital pada data wajib pajak	20 % 17 JP 100 % 10 % 10 % 100 %	1.971.905.550,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	135.111.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	134.826.600,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	120.540.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	196.046.900,00	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bukittinggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	72.924.480,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bukittinggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	96.166.300,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	136.723.200,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	129.560.800,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.04. 2.01.000 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bukittinggi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	1 Laporan	215.522.600,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bukittinggi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	1 Laporan	274.301.700,00	
5.02.04. 2.01.000 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bukittinggi	<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>	7500 Obyek Pajak	189.684.400,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bukittinggi	<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>	7500 Obyek Pajak	79.068.700,00	
5.02.04. 2.01.000 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bukittinggi	<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>	1 Dokumen	166.313.400,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bukittinggi	<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>	1 Dokumen	155.370.000,00	
5.02.04. 2.01.001 1	Penagihan Pajak Daerah	Bukittinggi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	12 Dokumen	826.778.880,00	Penagihan Pajak Daerah	Bukittinggi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	12 Dokumen	794.587.350,00	
5.02.04. 2.01.001 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bukittinggi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	12 Dokumen	97.444.400,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bukittinggi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	12 Dokumen	74.007.500,00	
5.02.04. 2.01.001 5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bukittinggi	<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	1 Laporan	20.529.400,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bukittinggi	<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	1 Laporan	37.969.700,00	

Setelah dilakukan analisis kebutuhan secara lebih mendalam terhadap program dan kegiatan yang direncanakan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, terdapat penyesuaian terhadap besaran anggaran yang dibutuhkan. Semula, total usulan program dan kegiatan tercatat sebesar Rp30.870.791.522,00, namun setelah dilakukan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan skala prioritas, efektivitas, efisiensi, serta ketersediaan sumber daya dan kondisi riil di lapangan, kebutuhan riil yang dapat diakomodasi menjadi sebesar Rp24.903.385.259,00.

Dengan demikian, terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp5.967.406.263,00. Pengurangan ini dilakukan sebagai bentuk penyelarasan antara usulan dengan kapasitas fiskal daerah serta prioritas pembangunan yang lebih strategis dan mendesak.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pengurangan anggaran tersebut antara lain:

1. Penyesuaian terhadap program/kegiatan yang belum mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2026, sehingga dapat ditunda ke tahun anggaran berikutnya.
2. Penyisiran terhadap komponen anggaran yang dianggap tidak efisien atau masih dapat dioptimalkan.
3. Pertimbangan keterjangkauan dan kapasitas pelaksanaan program.

Langkah penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat fokus pada program prioritas, serta memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat, Penganggaran Pokok Pikiran (Pokir) merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pokir berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat yang diusulkan oleh anggota dewan, yang kemudian diintegrasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini tidak hanya mencerminkan partisipasi publik, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Penganggaran Pokir dimulai dengan pengumpulan aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat dan reses yang dilakukan oleh DPRD. Hasil dari penyerapan aspirasi ini kemudian dikaji dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai program dan kegiatan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),

untuk memastikan bahwa setiap usulan valid dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Badan Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran. Namun, untuk rencana kerja tahun 2026 tidak ada program atau kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Pokir ataupun Musrembang yang ditempatkan di dalam program dan kegiatan Badan Keuangan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional Indonesia pada tahun 2026 berfokus pada pencapaian Indonesia yang lebih tangguh, mandiri, dan sejahtera, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tahun 2026 menjadi momentum penting di mana kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi diselaraskan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Indonesia memasuki fase transformasi dengan tujuan besar untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik dan memastikan kesejahteraan rakyat yang merata.

1. Pembangunan Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan: Sumitronomics

Salah satu konsep utama yang mengarahkan kebijakan ekonomi Indonesia pada 2026 adalah Sumitronomics, yang mengusung tiga pilar utama:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi
2. Pemerataan Manfaat Pembangunan
3. Stabilitas Nasional yang Dinamis

Pemerintah berkomitmen untuk menghidupkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memastikan sinergi yang solid antara fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi. Peningkatan produktivitas dan pemanfaatan potensi ekonomi domestik menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan target mencapai 8% dalam jangka menengah. Dalam hal ini, sektor-sektor resilien seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata akan diperkuat untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

2. Ketahanan Pangan dan Energi sebagai Pilar Utama

Ketahanan pangan dan energi menjadi dua pilar utama dalam kebijakan nasional 2026. Pemerintah menargetkan swasembada pangan dan stabilisasi harga pangan dengan anggaran sebesar Rp164,7 triliun. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, sektor energi juga menjadi perhatian utama dengan alokasi Rp402,4 triliun untuk meningkatkan lifting migas, mempercepat transisi energi ke sumber yang lebih ramah lingkungan, dan menjaga stabilitas harga energi. Ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memperkuat sektor energi terbarukan.

3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemerataan Pembangunan

Pembangunan manusia, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, menjadi prioritas penting. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp769,1 triliun untuk sektor pendidikan, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing SDM Indonesia. Program seperti Sekolah Unggul Garuda, Indonesia Pintar, dan beasiswa untuk pendidikan tinggi dirancang untuk memfasilitasi akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di sektor kesehatan, dengan anggaran Rp244 triliun, pemerintah akan memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta memastikan bahwa layanan kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil.

4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM

Sektor koperasi dan UMKM menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia 2026. Pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang akan mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan dasar seperti sembako, pupuk, dan layanan keuangan. Melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, diharapkan dapat tercipta ekonomi lokal yang lebih kuat, merata, dan berdaya saing.

5. Percepatan Investasi dan Reformasi Sistem Perizinan

Pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan iklim investasi di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Berbagai upaya deregulasi dan debottlenecking terus dilakukan untuk mempermudah investasi, salah satunya melalui penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Selain itu, peran Danantara sebagai lembaga yang mengakselerasi investasi juga akan diperkuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri strategis di Indonesia.

6. Stabilitas Ekonomi Nasional dan Pengendalian Inflasi

Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerintah berfokus pada pengendalian inflasi yang diperkirakan berada pada kisaran 2,5% pada tahun 2026. Stabilisasi harga pangan dan penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi strategi utama untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, kebijakan fiskal yang ekspansif dengan defisit 2,68% PDB tetap akan dikelola dengan hati-hati untuk memastikan fleksibilitas dalam menghadapi guncangan ekonomi global.

7. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat: Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

Salah satu target utama dari kebijakan nasional 2026 adalah penurunan jumlah penduduk miskin di bawah 20 juta orang (di bawah 7,5% dari total populasi) serta penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 4,44%-4,96%. Ini akan

dicapai melalui penciptaan 3,4 hingga 4 juta lapangan kerja baru dan memperkuat sektor-sektor yang dapat meningkatkan lapangan kerja formal.

8. Modernisasi Pertahanan dan Keamanan

Sektor pertahanan juga menjadi fokus kebijakan, dengan alokasi anggaran untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Keamanan negara yang stabil dan terjaga menjadi syarat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan

Tujuan dan sasaran merupakan turunan langsung dari visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bukittinggi. Keduanya menjadi dasar bagi perencanaan program dan kegiatan yang terukur, terarah, dan selaras dengan kewenangan serta fungsi Badan Keuangan.

Strategi disusun untuk menjembatani pencapaian sasaran melalui pendekatan yang tepat, inovatif, dan responsif terhadap tantangan dinamis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, arah kebijakan menggambarkan langkah-langkah kebijakan prioritas yang akan ditempuh dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Melalui bab ini, diharapkan terbangun kerangka berpikir yang terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan secara efektif dan efisien, sekaligus menjadi landasan bagi pengukuran kinerja organisasi dalam mendukung tercapainya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam jangka menengah, sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah serta arah kebijakan pembangunan daerah. Tujuan disusun sebagai orientasi strategis perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan anggaran, pendapatan, belanja, aset, dan akuntansi daerah.

Penetapan tujuan ini menjadi landasan utama dalam penyusunan sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2025–2029. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka pelaksanaan fungsi Badan Keuangan diharapkan dapat lebih terarah, terukur, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.



3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang telah ditetapkan, berupa hasil yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan capaian kinerja yang ingin diraih oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis organisasi.

Dalam konteks perencanaan jangka menengah, sasaran berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Dengan sasaran yang terukur dan realistis, pelaksanaan kebijakan dan program kerja dapat lebih fokus serta mudah dievaluasi tingkat keberhasilannya secara berkala. Sasaran yang dirumuskan dalam dokumen ini telah mempertimbangkan potensi dan kapasitas daerah, permasalahan aktual, serta isu-isu strategis di bidang pengelolaan keuangan, sehingga mampu menjawab kebutuhan daerah secara efektif dan mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Bukittinggi secara menyeluruh.

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR	TARGET TAHUN						KE T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujud nya pengelola an keuangan dan aset daerah yang transpara n dan akuntabel	Terwujud nya pengelola an keuangan dan aset daerah yang transpara n dan akuntabel	Peningkata n Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Secara Transparan , Efisien, dan Akuntabel	Opini WTP atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Dari tabel diatas, Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, sebagaimana menjadi sasaran utama dalam RPJMD, Badan Keuangan menetapkan tujuan strategis berupa Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Tujuan ini menjadi landasan dalam merancang program dan kegiatan selama periode 2025–2029.

Untuk mengukur capaian tujuan tersebut, digunakan indikator kinerja utama (IKU) berupa Opini WTP atas LKPD. Capaian opini WTP menjadi parameter utama yang menunjukkan keberhasilan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengelolaan keuangan daerah.

Secara bertahap dan berkelanjutan, target indikator ini dipertahankan pada capaian WTP setiap tahun mulai dari tahun 2025 hingga 2039. Hal ini mencerminkan komitmen jangka panjang dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah melalui penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta pengawasan yang efektif.

3.3 Program dan Kegiatan

Program sebagai bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunandaerah. Sesuai dengan Bab I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini Badan Keuangan) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Badan Keuangan dalam menyusun program guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan Badan Keuangan pada Tahun 2026 direncanakan kebutuhan dana/paguindikatif sebesar Rp24.903.385.259,00. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 disajikan dalam Tabel T.C 33 dibawah ini.



Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Bukittinggi

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN KEUANGAN				24.903.385.259,00				35.470.517.106,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				24.903.385.259,00				35.470.517.106,00
5.02	KEUANGAN		Bukittinggi		24.903.385.259,00				35.470.517.106,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kualitas pelayanan internal</i>	Bukittinggi	100 %	14.255.509.133,00			100 %	15.904.688.010,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Program dan kegiatan yang selaras</i>	Bukittinggi	100 %	27.198.900,00			100 %	31.280.000,00
5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Bukittinggi	2 Dokumen	27.198.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	31.280.000,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Kualitas pelayanan internal</i>	Bukittinggi	100 %	11.811.221.788,00			100 %	13.582.905.055,00
5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Bukittinggi	78 Orang/bulan	11.811.221.788,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		78 Orang/bulan	13.582.905.055,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Kualitas pelayanan internal</i>	Bukittinggi	-	225.000.000,00			-	258.750.000,00
5.02.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Bukittinggi	1 Dokumen	225.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	258.750.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Kualitas pelayanan internal</i>	Bukittinggi	100 %	782.427.000,00			100 %	848.492.425,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bukittinggi	3 Paket	3.443.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Paket	4.019.250,00
5.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bukittinggi	8 Paket	544.086.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		8 Paket	574.269.175,00
5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bukittinggi	12 Paket	24.188.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Paket	27.889.455,00
5.02.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bukittinggi	1 Laporan	39.708.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	45.664.545,00
5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bukittinggi	12 Laporan	171.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	196.650.000,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas pelayanan internal	Bukittinggi	-	365.654.945,00			-	0,00
5.02.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bukittinggi	1 Unit	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	0,00
5.02.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bukittinggi	1 Unit	365.654.945,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	Bukittinggi	100 %	173.420.000,00			100 %	199.433.000,00
5.02.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	1 Laporan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.300.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(DAU)			
5.02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Bukittinggi	12 Laporan	171.420.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	197.133.000,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Kualitas pelayanan internal</i>	Bukittinggi	100 %	870.586.500,00			100 %	983.827.530,00
5.02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Bukittinggi	1 Unit	39.190.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	45.068.500,00
5.02.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Bukittinggi	48 Unit	439.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		48 Unit	563.270.000,00
5.02.01.2.09.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>	Bukittinggi	1 Unit	17.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	20.424.000,00
5.02.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Bukittinggi	38 Unit	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		38 Unit	17.250.000,00
5.02.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Bukittinggi	1 Unit	359.636.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	337.815.030,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD; Persentase alokasi infrastruktur pelayanan publik; Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar; Persentase penurunan SILPA; Persentase laporan keuangan tepat waktu	Bukittinggi		6.968.973.576,00				15.230.260.372,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen alokasi belanja pegawai non-guru yang diverifikasi dan sesuai ketentuan TKD; Persentase kegiatan prioritas layanan publik yang didukung oleh alokasi anggaran infrastruktur	Bukittinggi	100 % 100 % undefined undefined	1.232.008.976,00			100 % 100 % undefined undefined	1.589.310.552,00
5.02.02.2.01.0 001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Bukittinggi	2 Dokumen	195.770.176,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	248.135.702,00
5.02.02.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Bukittinggi	2 Dokumen	186.425.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	237.388.980,00
5.02.02.2.01.0 003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bukittinggi	30 Dokumen	33.589.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Dokumen	38.627.465,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.01.004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	Bukittinggi	30 Dokumen	87.474.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Dokumen	100.596.135,00
5.02.02.2.01.007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	Bukittinggi	2 Dokumen	336.752.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	433.265.605,00
5.02.02.2.01.008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	Bukittinggi	4 Dokumen	299.513.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Dokumen	390.440.985,00
5.02.02.2.01.009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	Bukittinggi	2 Dokumen	92.483.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	140.855.680,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase dokumen DPA urusan wajib pelayanan dasar yang difasilitasi tepat waktu; Persentase kegiatan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaporkan realisasi keuangannya tepat waktu</i>	Bukittinggi	undefined undefined 100 % 100 % 100 % 100 %	362.093.400,00			undefined undefined 100 % 100 % 100 % 100 %	381.954.230,00
5.02.02.2.02.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	Bukittinggi	30 Dokumen	38.719.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Dokumen	44.527.425,00
5.02.02.2.02.004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>	Bukittinggi	12 Dokumen	17.790.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Dokumen	20.458.960,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	Bukittinggi	4 Dokumen	87.268.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Dokumen	100.359.120,00
5.02.02.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>	Bukittinggi	12 Laporan	38.096.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	43.810.745,00
5.02.02.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>	Bukittinggi	12 Dokumen	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Dokumen	34.810.745,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	Bukittinggi	1 Dokumen	56.461.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	33.211.655,00
5.02.02.2.02.011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Bukittinggi	30 Orang	123.756.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Orang	104.775.580,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Jumlah laporan keuangan SKPD/unit kerja yang dikompilasi dan disampaikan sesuai jadwal; Persentase laporan keuangan triwulanan/bulanan yang diverifikasi dan disampaikan tepat waktu</i>	Bukittinggi	100 % 100 % 100 % undefined undefined	797.165.200,00			100 % 100 % 100 % undefined undefined	820.664.590,00
5.02.02.2.03.002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>	Bukittinggi	30 Dokumen	48.880.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Dokumen	56.212.460,00
5.02.02.2.03.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	Bukittinggi	12 Laporan	53.858.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	61.938.310,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.03.004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	Bukittinggi	4 Laporan	22.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	35.000.000,00
5.02.02.2.03.005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	Bukittinggi	2 Dokumen	474.011.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	545.113.800,00
5.02.02.2.03.007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	Bukittinggi	2 Dokumen	25.007.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	28.758.395,00
5.02.02.2.03.011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Bukittinggi	60 Orang	98.107.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		60 Orang	63.569.125,00
5.02.02.2.03.012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>	Bukittinggi	9 Lembaga	75.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		9 Lembaga	30.072.500,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Pengelolaan Keuangan sesuai aturan</i>	Bukittinggi	100 %	4.500.000.000,00			100 %	12.363.213.000,00
5.02.02.2.04.008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	Bukittinggi	1 Laporan	3.500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	11.213.213.000,00
5.02.02.2.04.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	Bukittinggi	1 Laporan	1.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	1.150.000.000,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Sistem terintegrasi</i>	Bukittinggi	6 Bidang	77.706.000,00			6 Bidang	75.118.000,00
5.02.02.2.05.002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>	Bukittinggi	1 Dokumen	77.706.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	75.118.000,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase penambahan nilai aset tetap</i>	Bukittinggi		1.706.997.000,00				2.056.761.200,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase aset tetap hasil pengadaan yang dicatat dan diinput ke sistem sesuai jadwal; Persentase hasil inventarisasi aset baru yang ditindaklanjuti dengan pencatatan di KIB (Kartu Inventaris Barang)</i>	Bukittinggi	0.05 % 12 Informasi 0 Temuan	1.706.997.000,00			0.05 % 12 Informasi 0 Temuan	2.056.761.200,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03.2.01.001	Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	Bukittinggi	1 Dokumen	60.093.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	76.007.410,00
5.02.03.2.01.003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	Bukittinggi	2 Dokumen	9.065.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	10.424.750,00
5.02.03.2.01.005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	Bukittinggi	30 Laporan	1.119.260.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Laporan	1.287.149.920,00
5.02.03.2.01.007	Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	Bukittinggi	30 Laporan	124.509.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Laporan	230.000.000,00
5.02.03.2.01.008	Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>	Bukittinggi	12 Laporan	143.554.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	165.087.445,00
5.02.03.2.01.009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	Bukittinggi	12 Laporan	15.841.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	18.217.840,00
5.02.03.2.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	Bukittinggi	12 Dokumen	145.897.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Dokumen	167.782.585,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03.2.01.0 013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bukittinggi	30 Orang	88.775.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Orang	102.091.250,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah; Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan; Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Bukittinggi		1.971.905.550,00				2.278.807.524,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen perhitungan potensi PAD yang disusun dan disampaikan tepat waktu; Persentase temuan pengawasan internal yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi; Persentase hasil penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital pada data wajib pajak	Bukittinggi	20 % 17 JP 100 % 10 % 10 % 100 %	1.971.905.550,00			20 % 17 JP 100 % 10 % 10 % 100 %	2.278.807.524,00
5.02.04.2.01.0 002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bukittinggi	1 Dokumen	134.826.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	155.377.650,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	Bukittinggi	1 Laporan	196.046.900,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Alokasi Umum (DAU), Opsen PKB		1 Laporan	138.621.000,00
5.02.04.2.01.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	Bukittinggi	3 Unit	96.166.300,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Alokasi Umum (DAU), Opsen PKB		3 Unit	83.863.152,00
5.02.04.2.01.005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>	Bukittinggi	12 Laporan	129.560.800,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Alokasi Umum (DAU), Opsen PKB		12 Laporan	157.231.680,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	Bukittinggi	1 Laporan	274.301.700,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Alokasi Umum (DAU), Opsen PKB		1 Laporan	247.850.990,00
5.02.04.2.01.007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>	Bukittinggi	7500 Obyek Pajak	79.068.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7500 Obyek Pajak	218.137.060,00
5.02.04.2.01.008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>	Bukittinggi	1 Dokumen	155.370.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	191.260.410,00
5.02.04.2.01.011	Penagihan Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	Bukittinggi	12 Dokumen	794.587.350,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Alokasi Umum (DAU), Opsen PKB		12 Dokumen	950.795.712,00
5.02.04.2.01.013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	Bukittinggi	12 Dokumen	74.007.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Dokumen	112.061.060,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bukittinggi	1 Laporan	37.969.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	23.608.810,00
J U M L A H					24.903.385.259,00				35.470.517.106,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Badan Keuangan disusun dengan mengacu pada kebutuhan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional. Proses penyusunan rencana kerja ini melalui serangkaian tahapan yang dimulai dengan pengumpulan data, analisis kebutuhan, hingga perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, Badan Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan Rencana Kerja yang tidak hanya mencerminkan tugas dan fungsinya, tetapi juga selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Rencana Kerja ini dirancang untuk memastikan penatausahaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, rencana kerja harus memiliki sifat yang akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan yang progresif dan berkelanjutan di daerah.

Pendanaan merupakan elemen krusial dalam proses perencanaan, yang sangat bergantung pada alokasi anggaran yang dikelola dengan cermat. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus disertai dengan estimasi biaya yang transparan dan terperinci. Dalam konteks ini, penganggaran berbasis kinerja menjadi prinsip yang sangat penting. Setiap alokasi anggaran harus dikaitkan dengan tujuan dan hasil yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur dan telah disepakati. Dokumen seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA) menjadi acuan utama dalam penganggaran, yang merinci dengan detail kebutuhan dana untuk belanja dan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan dokumen perencanaan strategis lainnya. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dapat menciptakan sinergi yang baik antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan pembangunan daerah, serta memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan daerah tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan antara lain:

- a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memusatkan tujuan/arrah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
- d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU dan DAK).

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2026 disusun dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, rencana kerja ini merujuk pada kebijakan-kebijakan strategis yang terkandung dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih besar, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Kedua dokumen ini menjadi landasan utama dalam merumuskan arah kebijakan keuangan yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, baik dalam jangka panjang maupun menengah.


Tahun 2026 merupakan tahun penting dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, yang tidak hanya mendukung stabilitas fiskal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan yang lebih luas. Dalam konteks ini, Badan Keuangan sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam penatausahaan keuangan daerah, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program keuangan yang dijalankan dapat mendukung tujuan yang termaktub dalam RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029. Oleh karena itu, Rencana Kerja ini dirancang dengan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan pembangunan, serta proyeksi anggaran yang realistis dan terukur.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan berbasis kinerja, Badan Keuangan akan mengimplementasikan prinsip penganggaran yang terukur dan berfokus pada hasil yang konkret. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan akan dilengkapi dengan estimasi biaya yang jelas, yang memastikan alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) akan menjadi acuan dalam merinci kebutuhan dana, baik untuk belanja operasional maupun pembiayaan, sehingga penggunaan anggaran dapat dijaga agar tetap efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Kami juga menyadari bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait, baik di tingkat pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, Badan Keuangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi. Ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Dengan berlandaskan pada RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029, kami percaya bahwa melalui koordinasi yang efektif, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengelolaan keuangan yang cermat, Badan Keuangan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi masyarakat Kota Bukittinggi.

Demikianlah laporan ini kami susun, semoga dapat menjadi pedoman yang memberikan arah yang jelas bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, serta kontribusi nyata dalam pembangunan Kota Bukittinggi yang lebih gemilang.

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS